

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Kepedulian terhadap ibu menyusui mengenai pentingnya pemberian ASI untuk bayi secara eksklusif selama 6 bulan dan dilanjutkan hingga 2 tahun. Sebagai wujud kepedulian tersebut, maka setiap tanggal 1 sampai 7 Agustus diperingati sebagai Pekan ASI se-dunia atau Hari ASI se-dunia. Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa setiap bayi berhak mendapatkan ASI eksklusif sejak lahir selama 6 bulan atas indikasi medis. Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa putusan hukum hakim terhadap ibu menyusui pada perkara nomor 35/pid.b/2020/pn.pkl ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan belum mengutamakan kepentingan anak yang wajib diberi ASI eksklusif minimal selama 6 bulan hingga 2 tahun.

Kemudian putusan hukum hakim terhadap ibu menyusui pada perkara nomor 35/pid.b/2020/pn.pkl ditinjau dari sisi keadilan, belum mencerminkan keadilan bagi terdakwa. Hakim seharusnya dapat memberikan kesempatan kepada terdakwa, minimal selama 6 bulan hingga masa pemberian ASI eksklusif berakhir melalui pidana pengawasan, sehingga terdakwa dapat menjalankan kewajibannya untuk menyusui anaknya, dan korban pun tetap mendapat keadilan karena terdakwa dapat mempertanggungjawabkan tindakannya setelah masa pemberian ASI ekslusif berakhir.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- A.A. Ngurah Wirasila, dkk, *Buku Ajar Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP Kejadian dan Pelanggaran Terhadap Harta Benda*, Universitas Udayana, Denpasar, 2017.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Andi Maulana Mustamin, editor, Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta, 2012.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Kadarudin, editor, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016.
- Atikah Proverawati, Eni Rahmawati, *Kapita Selekta ASI & Menyusui*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2010.
- Boris, *Panduan Memahami (Masalah) Hukum di Masyarakat Agar Tidak Menjadi Korban*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni AHMPTHM, 2018.
- John Rawls, *A Theory of Justice Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019.
- Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*, PT Fikahati Aneska, Bandung, 2009
- Satohid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Bagian Satu*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun.
- Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Total Media, 2009
- Tim, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2015.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012.

Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.

Yoyok Ucok Suyono, *Teori Hukum Pidana dalam Penerapan Pasal di KUHP*, Unitomo Press, Surabaya, 2019.

### **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Jo Pasal 128-200 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

### **C. Sumber Lain**

Andi Cenra Opu, Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Korupsi Duna Jamkesmas di Kabupaten Kepulauan Selayar (Studi Kasus: Putusan No: 67/pid.b/ 2010/ pn.sly), Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014.

Dekka Ajeng Maharasri, Analisis Yuridis Wewenang Jaksa Penuntut Umum dalam Penahanan (Studi Komparatif dengan Rancangan KUHAP), Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2018.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Pkl.

Fitriani, Implementasi Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Tentang Penangguhan Penahanan Di Polrestabes Makassar, Jurnal Skripsi, Universitas Negeri Makassar, Makassar, 2020.

Hariman Satria, Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana, *Jurnal Media Hukum Volume 25 Nomor 1, DOI: 10.18196/jmh.2018.0107.111-123*, Juni 2018.

Hartati S. Nusi, Penangkapan dan Penahanan sebagai Upaya Paksa dalam Pemeriksaan Perkara Pidana, *Lex Crimen Volume V, Nomor 4*, April-Juni 2016.

Herlina, dkk, Penerapan Pasal 31 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Tentang Penangguhan Penahanan Di Kepolisian Resor Pohuwato, ol. XVI, Nomor 1, Juni 2020.

Herning&Triana, Kebijakan Pemberian Asi Eksklusif Bagi Pekerja Perempuan Di Indonesia, *Muwazah ISSN 2502-5368 (Paper), ISSN 2085-8353 (Online)*, Vol. 8, No.1, Juni 2016.

- H. Eddy Djunaedi Karnasudirdja, Beberapa Pedoman pemidanaan dan Pengamatan Narapidana, sebagaimana dikutip Slamet Siswanta, “Pidana Pengawasan dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia”, Tesis, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, hal. 81-82.
- H. Muhammad Khambali, “Perlindungan Hukum Masyarakat Terhadap Cybercrimes Berbasis Keadilan Bermartabat”, *Cakrawala Hukum, Volume XIII, Nomor 02, pISSN: 1979-8487, eISSN: 2527-4236*, 2017.

<https://sumeks.co/ibu-ditahan-bayi-ikut-ditahan/>, Diakses pada tanggal 28 Maret 2021 pukul 22.40 WIB.

Intan Zainafree, dkk., Kebijakan Asi Eksklusif dan Kesejahteraan Anak dalam Mewujudkan Hak-Hak Anak, Soepra Jurnal Hukum Kesehatan, Volume 2, Nomor 1, 2016.

Iqbal Hasanuddin, “Keadilan Sosial: Telaah atas Filsafat Politik John Rawls”, *Refleksi Volume 17 Nomor 2*, Oktober 2018.

Michel Tandra, Penerapan Syarat Subyektif Sebagai Dasar Penahanan Terhadap Tersangka Oleh Penyidik Polisi, Studi kasus, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2014.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Penjelasan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Penjelasan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Puteri Hikmawati, Pidana Pengawasan sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif, *Negara Hukum Volume 7 Nomor 1 Juni 2016*.

Ria Djusnita, Penangkapan dan Penahanan Dalam Tindak Pidana Terorisme (Studi Kasus Lutfi Haidaroh Alias Ubaid), Studi kasus, Universitas Indonesia, Depok, 2011.

Teguh Prasetyo, “Kejahatan Pertambangan Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat”, *Perspektif Volume XXI Nomor 1*, 2016.